

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada Bulan Juli 2024 Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung tercatat mengalami deflasi 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan pada Juni 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,11% (mtm). Deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,10%; -0,08%; -0,02%; dan -0,02%.
 2. Pada Bulan Agustus 2024 Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung tercatat mengalami inflasi 0,07% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Juli 2024 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,16% (mtm). Inflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga seperti beras, kopi bubuk, biaya Pendidikan sekolah menengah atas, sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,15%; 0,07%; 0,06%; 0,04%; dan 0,02%.
 3. Pada Bulan September 2024 Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung tercatat mengalami deflasi 0,05% (mtm), lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm). Inflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga seperti biaya akademik/ perguruan tinggi, bawang merah, beras, biaya sewa rumah dan nasi dengan lauk dengan andil masing-masing sebesar 0,26%; 0,06%; 0,03%; dan 0,02%.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berlanjutnya permasalahan seperti di triwulan II Tahun 2024 yaitu Potensi kenaikan permintaan agregat yang didorong oleh kenaikan UMP tahun 2024; tren kenaikan harga emas dunia; Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; Kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan;
 1. Kenaikan harga beras dengan berakhirnya priode panen raya;
 2. Kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET Minyakita.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang telah di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Keterjangkauan Harga:** - Tetap melakukan **operasi pasar beras/SPHP** secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET (seperti Triwulan II) ; - Melakukan **monitoring harga** dan **pasokan**, khususnya pada komoditas-komoditas sbb:

(a) Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu khususnya di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Timur selaku wilayah IHK, (b) Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang memiliki potensi seperti beras dan daging ayam ras.

2. **Ketersediaan Pasokan:** - Implementasi Toko Pengendalian Inflasi wilayah IHK/Non IHK. Telah diresmikan toko MAPAN “Mtero Antisipasi Pengendalian Harga Pangan” di Kota Metro menjadi pembuka program tersebut; - Implementasi toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung” di Kota Bandar Lampung sebagai pusat operasi pasar di Kota Bandar Lampung.
3. **Kelancaran Distribusi :** -Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung-Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung-Bali dan Lampung-Batam, serta operasionalisasi Dermaga Aksekutif Pelabuhan Bakauheni. - Penguatan koordinasi antar OPD dan Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 23 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah. -Implementasi Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar” di Kota Bandar Lampung sebagai fasilitas distribusi kepada TPID.
4. **Komunikasi Efektif:** -tetap melanjutkan kebijakan pada triwulan II tahun 2024 yaitu Melakukan rapat koordinasi rutin formal mingguan di setiap Kabupaten/Kota IHK serta dan informal melalui WhatsApp Group TPID, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini. -Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku *panic buying*

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut: selalu melakukan koordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Satgas Pangan Provinsi Lampung guna mengendalikan inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. TPID bersama Satgas Pangan melakukan monitoring harga dan ketersediaan pada distributor dan pasar.
2. TPID Provinsi Lampung melalui Tim Penggerak PKK melaksanakan melaksanakan Gerakan tanam cabai di Agropark
3. Melakukan pengawasan bersama satgas pangan terkait kelancaran distribusi pangan dari tingkat distributor sampai ke pengecer.
4. Secara rutin mengikuti rakor inflasi yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan selanjutnya dilaksanakan Rapat Teknis TPID Provinsi Lampung
5. Mengingatkan Pemda Kabupaten/Kota dengan menerbitkan Surat Gubernur melalui Surat Pj Gubernur Lampung tentang Penanganan Pupuk Bersubsidi yang di tujukan ke Walikota Bandar Lampung, Bupati Lampung Timur, Pesawaran dan Way Kanan; Surat *Extra Effort* Pengendalian Inflasi ditujukan ke Bupati Lampung Timur dan Mesuji
6. Menyelenggarakan pasar murah bekerjasama dengan beberapa BUMN/D dan Pihak Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Secara konsisten dan bersama-sama memantau perkembangan harga pasar yang dilakukan masing-masing TPID baik tingkat Provinsi Lampung maupun tingkat

Kabupaten/Kota.

8. Tim Satgas dan Monitoring BBM, LPG bersubsdi Provinsi Lampung melakukan monitoring di SPBU, agen dan pangkalan di Zona I dan II